

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Bencana akibat dampak perubahan iklim dalam beberapa dekade terakhir menyebabkan timbulnya masalah besar di kawasan pesisir Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Fenomena ini menyebabkan terjadinya kekeringan, banjir, kebakaran hutan, kenaikan muka air laut, dan abrasi. Bencana tersebut menimbulkan ancaman terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat pesisir di Kecamatan Lasem. Perubahan karakteristik curah hujan mengakibatkan timbulnya fenomena banjir dengan ketinggian 30 cm dalam jangka waktu 3-5 hari. Kekeringan juga terjadi hampir sepanjang tahun di kawasan pesisir Kecamatan Lasem menyebabkan krisis air bersih untuk keperluan hidup dan ekonomi masyarakat. Kekeringan juga menimbulkan terjadinya kebakaran hutan di Desa Binangun. Oleh karena itu, masyarakat pesisir di Kecamatan Lasem perlu untuk memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengurangi adanya gangguan bencana akibat dampak perubahan iklim yang disebut sebagai ketahanan masyarakat pesisir. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana akibat dampak perubahan iklim di kawasan pesisir Kecamatan Lasem. Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh Orencio dan Fuji (2013) tentang ketahanan masyarakat dengan mempertimbangkan 4 (empat) elemen yaitu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, penghidupan yang berkelanjutan, perlindungan sosial, dan sistem perencanaan.

Berdasarkan hasil penilaian melalui 3 perspektif yaitu *individual resilience*, *capital resilience*, dan *overall resilience*, maka dapat diketahui bahwa masyarakat pesisir di Kecamatan Lasem memiliki tingkat ketahanan masyarakat yang tergolong kurang dan membutuhkan adanya intervensi pembangunan. Kurangnya tingkat ketahanan masyarakat ini dikarenakan adanya kesadaran pengelolaan lingkungan yang masih rendah, ketersediaan informasi kebencanaan yang belum dapat mengakses masyarakat, dan rendahnya perlindungan bencana selain bencana banjir. Pemberian peran dan tanggung jawab masyarakat secara individual dapat membangun kesadaran masyarakat dalam merespon bencana yang terjadi. Penyebaran informasi terkait bencana dan pengelolaan ini perlu dilakukan secara intergratif dengan membangun inisiasi kapasitas individu. Informasi terkait kebencanaan dan pengelolaan lingkungan sangat penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat, hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola lingkungan.

Penghidupan yang berkelanjutan masyarakat pesisir di Kecamatan Lasem masih rendah. Rendahnya tingkat penghidupan ini disebabkan karena tidak tersedianya bantuan logistik dan non-logistik dari pemerintah, LSM, dll. Kemudian, masyarakat pesisir Kecamatan Lasem belum memiliki mata pencaharian alternatif sehingga ketika bencana terjadi masyarakat pesisir Kecamatan Lasem tidak memiliki strategi alternatif sumber penghidupan. Selain itu, mayoritas masyarakat pesisir juga belum memiliki jaminan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan terhadap aset. Sehingga dapat menimbulkan kerentanan saat bencana terjadi.

Tingkat perlindungan sosial juga masih sangat rendah dalam ketahanan masyarakat pesisir. Hal tersebut disebabkan karena koordinasi yang sangat rendah diantara komunitas masyarakat serta rendahnya eksistensi komunitas dalam masyarakat. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang telah ada di kawasan pesisir Kecamatan Lasem perlu didukung dan diusahakan untuk dapat terbentuk di kawasan pesisir. Selain itu, juga perlu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi masyarakat sehingga kesiapsiagaan masyarakat dapat meningkat. Kemudian, sistem perencanaan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah lokal dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rumusan pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. Sistem perencanaan masih rendah dalam mendorong ketahanan masyarakat pesisir. Hal ini diindikasikan dari rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam penyusunan kebijakan terkait kebencanaan dan pengelolaan lingkungan.

Secara kapital, kawasan pesisir memiliki kondisi tingkat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap desa. Desa Dasun memiliki tingkat pengelolaan sumber daya alam tertinggi disebabkan karena desa memiliki perlindungan terhadap terjadinya bencana yang tinggi. Sementara itu, Desa Bonang dan Desa Gedongmulyo memiliki ketersediaan informasi yang rendah. Informasi terkait kebencanaan perlu disebarluaskan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebencanaan dan pengelolaan lingkungan. Kawasan pesisir di Kecamatan Lasem memiliki tingkat penghidupan berkelanjutan tertinggi di Desa Dasun karena masyarakat pesisir telah memiliki sumber mata pencaharian secara tetap dan telah memiliki akses terhadap peminjaman bank, koperasi, dan perlindungan aset.

Kemudian, tingkat perlindungan sosial menilai tanggung jawab, keterikatan antar komunitas, dan partisipasi masyarakat. Desa Dasun memiliki tingkat sosial yang tertinggi disebabkan karena ketersediaan komunitas masyarakat dalam kebencanaan dan pengelolaan lingkungan. Disisi lain, tingkat perlindungan sosial yang terendah yaitu Desa Gedongmulyo yang disebabkan karena minimnya ketersediaan komunitas masyarakat pengelolaan bencana. Ketersediaan komunitas masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat agar terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pembangunan di Kecamatan Lasem. Sistem perencanaan di kawasan pesisir Kecamatan Lasem tertinggi berada di Desa Dasun. Hal tersebut disebabkan karena adanya keputusan, kebijakan, dan

perencanaan komunitas terkait kebencanaan dan pengelolaan lingkungan. Sistem perencanaan terendah yaitu di Desa Gedongmulyo dan Desa Bonang disebabkan karena rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan ketahanan masyarakat pesisir.

Secara keseluruhan, masyarakat pesisir di Kecamatan Lasem memiliki tingkat ketahanan yang rendah yaitu dengan nilai C. Berdasarkan hasil analisis, masyarakat pesisir Kecamatan Lasem tergolong dalam tingkat ketahanan masyarakat kelompok C. Rendahnya tingkat ketahanan masyarakat pesisir di Kecamatan Lasem ini disebabkan karena rendahnya perlindungan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini dipicu karena adanya kesadaran dalam pengelolaan lingkungan yang rendah, adanya praktik perlindungan bencana yang masih terbatas, dan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar. Rendahnya tingkat ketahanan masyarakat pesisir ini juga disebabkan karena kemampuan penghidupan yang berkelanjutan masih sangat rendah. Hal tersebut dipicu dari adanya akses yang rendah untuk dapat memperoleh bantuan logistik dan non-logistik dari lembaga formal maupun non-formal, habitat alami yang tersedia tidak memiliki pengelolaan yang baik, dan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam. Masyarakat yang tinggal di desa pesisir lebih banyak bekerja pada bidang industri perikanan sementara masyarakat yang tinggal di dataran tinggi bekerja di bidang pertanian dan peternakan. Sistem akses yang terbuka dan kapitalisasi perikanan yang kecil dapat memberikan keselamatan umum untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, masyarakat percaya bahwa kemampuan untuk beradaptasi dan pulih berkaitan dengan penghidupan yang berkelanjutan, hal ini dapat dengan meningkatkan dukungan terhadap institusi yang memberikan distribusi sumber daya yang merata.

Rendahnya perlindungan sosial masyarakat terhadap lingkungan juga disebabkan keterlibatan masyarakat yang rendah dalam kegiatan sosial, koordinasi antar komunitas yang rendah, dan belum memiliki mekanisme komunitas yang jelas. Kemudian, rendahnya sistem perencanaan ini disebabkan karena minimnya ketersediaan informasi terkait kebencanaan dan pengelolaan lingkungan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kawasan pesisir Kecamatan Lasem. Dalam membangun pengelolaan bencana dan lingkungan yang baik, maka perlu adanya kebijakan pemerintah melalui peraturan pemerintah, forum *multistakeholder* yang mengintegrasikan antar seluruh pengarusutamaan pertimbangan risiko bencana dalam peraturan pemerintah pada tingkat kecamatan maupun nasional. Pengintegrasian ini tidak hanya melalui substansial kebijakan pemerintah lokal namun juga menyangkut peran dan tanggung jawab aktor pemerintahan serta secara spasial. Sehingga, pertimbangan ini dapat meningkatkan ketahanan masyarakat secara masif dan berkelanjutan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian kondisi ketahanan masyarakat pesisir di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang telah dilakukan, maka disusunlah rekomendasi penelitian sebagai berikut. Rekomendasi penelitian ini bertujuan untuk memberikan arahan peningkatan ketahanan masyarakat pesisir di Kecamatan Lasem agar memiliki kapasitas untuk menghadapi dan mengurangi dampak bencana akibat perubahan iklim. Secara keseluruhan rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut.

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

1. Masyarakat di kawasan pesisir Kecamatan Lasem terutama di Desa Gedongmulyo, Bonang, dan Desa Binangun diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan dan kebencanaan misalnya melalui keikutsertaan dalam kegiatan sosial;
2. Perlu adanya peningkatan praktik lingkungan perlindungan bencana terutama di Desa Gedongmulyo, Dasun, Bonang, dan Desa Binangun seperti sistem peringatan dini, pembuatan tanggul, penanaman mangrove di sepanjang pesisir pantai, normalisasi sungai, dan reboisasi hutan untuk mencegah terjadinya bencana.
3. Pemerintah diharapkan mampu untuk melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sosial terkait dengan pengetahuan dasar kebencanaan dan pengelolaan lingkungan serta mempromosikan upaya pengurangan dan penanggulangan bencana terutama di Desa Gedongmulyo, Bonang, dan Desa Binangun yang dapat memberikan informasi terkait kebencanaan dan pengelolaan lingkungan;

b. Penghidupan yang Berkelanjutan

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan akses terhadap pelayanan sosial dan bantuan saat terjadi bencana terutama di Desa Gedongmulyo, Bonang, dan Desa Binangun;
2. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan dasar air bersih untuk menanggulangi bencana akibat kekeringan. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui sistem perpipaan dari PDAM maupun Non-PDAM terutama pada desa-desa yang mengalami intensitas kekeringan yang tinggi seperti di Desa Gedongmulyo, Dasun, dan Desa Binangun.
3. Masyarakat di kawasan pesisir Kecamatan Lasem terutama di Desa Gedongmulyo, Dasun, Bonang, dan Desa Binangun diharapkan dapat menjaga keberlanjutan habitat alami lokal seperti pertanian, kehutanan, tambak, dll;
4. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jaminan asset dan asuransi kesehatan, pendidikan, dll terutama di Desa Gedongmulyo dan Desa Binangun;
5. Perlu adanya pengembangan kesempatan kerja dan ekonomi lokal untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Kapasitas ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan

masyarakat untuk menghadapi bencana agar mendukung pendanaan *recovery* ketika bencana terjadi di kawasan pesisir Kecamatan Lasem.

c. Perlindungan Sosial

1. Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat yang berinisiatif untuk membentuk kelompok atau komunitas masyarakat terkait kebencanaan dan pengelolaan lingkungan terutama di Desa Gedongmulyo dan Desa Bonang;
2. Masyarakat di kawasan pesisir Kecamatan Lasem terutama di Desa Dasun dan Desa Binangun diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial terkait kebencanaan dan pengelolaan lingkungan, melakukan tindakan-tindakan adaptif, dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan timbulnya bencana akibat dampak perubahan iklim;
3. Masyarakat di kawasan pesisir terutama di Kecamatan Lasem diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan bencana;
4. Komunitas masyarakat di kawasan pesisir Kecamatan Lasem terutama di Desa Gedongmulyo, Dasun, Bonang, dan Desa Binangun diharapkan dapat meningkatkan pengembangan inovasi dan kegiatan terkait pencegahan dan penanggulangan bencana serta pengelolaan lingkungan;
5. Perlu adanya pembuatan jalur evakuasi untuk meminimalisir adanya korban jiwa ketika bencana terjadi. Pembuatan jalur ini terutama di wilayah yang memiliki intensitas bencana yang tinggi seperti di Desa Gedongmulyo dan Desa Bonang;

d. Sistem Perencanaan

1. Pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan dan kebencanaan seperti rencana kontijensi bencana dan meningkatkan integrasi peningkatan rencana tata ruang dengan pendanaan pembangunan baik dari lingkup nasional maupun desa yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya untuk mendorong terwujudnya desa tangguh;
2. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi *multistakeholder* dan melibatkan masyarakat dalam upaya-upaya merumuskan dan merencanakan kebijakan dan strategi pembangunan kota untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. Masyarakat di kawasan pesisir Kecamatan Lasem diharapkan mampu untuk berperan serta membangun komunitas masyarakat yang berperan optimal dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta pengelolaan lingkungan.